

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan penelitian ini telah memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, tata kelola pemerintahan, dan deforestasi di lima negara kawasan ASEAN. Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, diperoleh beberapa temuan utama yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan melalui GDP per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat deforestasi di lima negara kawasan ASEAN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita masih berkaitan dengan berkurangnya proporsi kawasan hutan (*forest area*) yang mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan pada tahap awal pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan penggunaan lahan untuk mendukung kegiatan produksi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.
2. Pada variabel kuadrat GDP per kapita (GDP^2) ditemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap deforestasi di lima negara ASEAN.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi membentuk pola U (*U-shaped*), sehingga hipotesis *Environmental Kuznets Curve* (EKC) tidak terbukti pada lima negara kawasan ASEAN selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan belum secara otomatis mampu memperbaiki kondisi hutan tanpa didukung oleh kebijakan lingkungan dan kualitas institusi yang memadai.

3. Perdagangan internasional terbukti memiliki pengaruh positif terhadap deforestasi di lima negara ASEAN. Tingginya aktivitas perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, mendorong peningkatan kebutuhan produksi dan penggunaan lahan dalam skala besar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan perdagangan di negara berkembang masih memiliki
4. keterkaitan yang cukup kuat dengan eksploitasi sumber daya alam dan perubahan kawasan hutan.
5. Tata kelola pemerintahan (*governance*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap deforestasi di lima negara kawasan ASEAN. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan belum mampu memengaruhi perubahan kondisi kawasan hutan secara langsung. Dengan demikian, perubahan tingkat deforestasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan karakteristik pemanfaatan lahan di masing-masing negara.

6. Tata kelola pemerintahan mampu memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan deforestasi dengan memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan tekanan kawasan hutan. Hal tersebut juga memberikan pemahaman bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki peran yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup di negara-negara ASEAN.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, pemerintah di negara-negara kawasan ASEAN disarankan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efektivitas regulasi lingkungan, pengawasan penggunaan lahan, serta pengendalian eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional dapat berlangsung tanpa meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan secara berlebihan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian disarankan untuk memperdalam kajian mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lingkungan secara lebih eksplisit ke dalam pengukurannya. Pengembangan indikator yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas pembangunan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menguji indikator lingkungan yang lebih spesifik, seperti *forest loss*, laju deforestasi tahunan, atau emisi karbon, serta mengkaji masing-masing dimensi tata kelola pemerintahan secara terpisah, seperti *government effectiveness*, *rule of law*, dan *control of corruption*, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kelembagaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.